

PIDATO LUSTRUM XIV

FAKULTAS PERTANIAN

UNIVERSITAS GADJAH MADA YOGYAKARTA

Judul :
**KOMITMEN FAKULTAS PERTANIAN DALAM PEMBANGUNAN PERKEBUNAN
DAN KESEJAHTERAAN PETANI MELALUI KEMITRAAN**

Oleh :
Dr. Ir. Rachmad Gunadi, M.Si.



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA



FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
2016

**PIDATO ILMIAH
PADA ACARA PERINGATAN LUSTRUM XIV
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
27 SEPTEMBER 2016**

**“KOMITMEN FAKULTAS PERTANIAN DALAM
PEMBANGUNAN PERKEBUNAN DAN KESEJAHTERAAN
PETANI MELALUI KEMITRAAN”**



**Oleh:
Rachmad Gunadi**

**LUSTRUM XIV
FAKULTAS PERTANIAN
UNIVERSITAS GADJAH MADA
YOGYAKARTA
2016**

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh..

Selamat pagi.... Salam sejahtera bagi kita semua....

Yang saya hormati,..

- Rektor Universitas Gadjah Mada;***
- Ketua beserta segenap pengurus Senat Fakultas Pertanian UGM;***
- Dekan Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada;***
- Para Wakil Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;***
- Para Guru Besar, Staf edukatif beserta seluruh anggota sivitas akademika Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;***
- Para Alumni Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada;***
- Para tamu undangan sekalian yang saya muliakan.....***

Sungguh merupakan kehormatan yang luar biasa bagi saya, mendapatkan amanat yang terhormat ini untuk menyampaikan pidato dalam rangka peringatan Lustrum XIV Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada yang tepat jatuh pada hari ini Selasa, 27 September 2016. Pada hari yang berbahagia ini saya ditugasi untuk menyampaikan topik terkait dengan Kiprah dan Peran PT. Pagilaran dalam mengimplementasikan komitmen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dalam peningkatan kesejahteraan bagi petani.

Bapak-Ibu hadirin yang saya muliakan,

Di tengah berbagai isu yang menerpa sektor pertanian, diantaranya tentang rendahnya harga komoditas, isu kualitas dibalik rendahnya '*demand*' produk pertanian Indonesia, biaya produksi yang terus melambung, tata niaga yang tidak memihak pada pelaku usaha di bagian yang paling hulu yaitu petani, umur tanaman perkebunan yang sudah tua, *handycap* dalam pelaksanaan *replanting*, alih fungsi lahan, import produk pertanian yang terus meningkat, regulasi yang tumpang tindih dan terkadang paradoxial satu sama lain, dan sebagainya, semakin menyulitkan penentuan arah dan percepatan pengembangan pertanian di Indonesia.

Pada saat yang sama, muncul catatan tentang rendahnya keterlibatan alumni perguruan tinggi pertanian (termasuk Fakultas Pertanian UGM) dalam dunia pertanian. Statistik menggambarkan kurang dari 20%, lulusan Fakultas Pertanian yang bekerja di sektor pertanian.

Di tengah situasi yang demikian itu Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada merayakan hari jadinya yang ke 70 tahun dengan tetap memegang teguh komitmen untuk meyumbangkan sumbangsih terbaiknya bagi kemajuan pertanian Indonesia.

Saya ingin mengajak hadirin sekalian yang mulia, untuk mengingat petikan pidato Bung Karno, presiden pertama Republik Indonesia pada saat melakukan peletakan batu pertama pembangunan kampus Institut Pertanian Bogor pada tanggal 27 April 1952 :

“Jadikanlah bangsamu ini bangsa yang kuat, bangsa yang merdeka dalam arti merdeka yang sebenar-benarnya. Buat apa kita bicara tentang politik bebas kalau kita tidak bebas dalam hal urusan beras, yaitu selalu harus minta tolong beli beras dan bangsa-bangsa tetangga ?”.

Sebelum kalimat tersebut diucapkan Bung Karno banyak menyebut tentang ancaman bahaya kelaparan, tentang impor beras dari Burma dan Siam, tentang pentingnya kesesuaian lahan bagi pertanian, tentang seleksi tanaman, tentang pemupukan dan sebagainya yang intinya adalah betapa pertanian dalam arti luas sangat penting bagi pembangunan bangsa, bukan saja untuk penyediaan pangan bagi rakyat, namun juga akan sangat menentukan perekonomian negara. Pidato itu ditutup dengan pernyataan bahwa dengan didirikannya perguruan tinggi pertanian maka, diharapkan persoalan-persoalan bangsa di Indonesia terkait dengan pertanian akan dapat di selesaikan.

Pada hari ini sudah lebih dari 60 tahun sejak pidato itu disampaikan, persoalan-persoalan bangsa terkait dengan pertanian tidak kunjung dapat di selesaikan, meskipun setelah itu

sudah tumbuh ratusan fakultas pertanian yang tersebar di seluruh Indonesia. Pertanian Indonesia masih saja berkutat dengan persoalan rendahnya produktivitas, luas lahan yang sempit, kemiskinan petani, mahalny sarana produksi dan sebagainya... sementara ribuan sarjana pertanian yang dihasilkan oleh pendidikan tinggi pertanian di Indonesia tidak tertarik untuk hadir dalam fungsinya sebagai kader-kader yang diharapkan menyelesaikan persoalan-persoalan pertanian bangsa ini yang sudah ada sejak Indonesia mendeklarasikan kemerdekaannya.

Pertanian dan Pemerdekaan.....

Hadirin sekalian yang saya muliakan.....

Pidato Bung Karno pada tahun 1952 yang petikannya saya sampaikan dimuka setidaknya memuat dua hal pokok yaitu:

- Adanya permasalahan-permasalahan pertanian di Indonesia;
- Dibutuhkannya sarjana-sarjana pertanian untuk mengatasi persoalan pertanian di Indonesia.

Agus Pakpahan (2016) menyebutkan bahwa memahami apa itu pertanian memang tidak mudah, belum tentu orang yang mendapatkan pendidikan tinggi sekalipun mampu memahami pertanian dipandang dalam segi hal yang mendasar yaitu, kemerdekaan sekaligus kemerdekaan umat manusia. Pertanian lebih banyak dipandang sebagai alat produksi pangan. Ini tidak keliru, namun belum cukup mendasar. Apabila sekedar untuk tujuan memproduksi pangan, maka cukup dilakukan oleh petani.

Namun, apakah cukup demikian?, mengapa sampai sekarang bahkan di negara-negara maju sekalipun petani masih menjadi tulang punggung pertanian negara, walaupun di negara-negara industri populasi petani hanya meliputi 2% saja dari populasi penduduk negara?. Apakah para petani tersebut miskin walaupun kontribusi pendapatan dari hasil penjualan komoditas yang mereka produksi hanya meliputi lebih kurang 20% dari total pendapatan mereka?. Ternyata jawabannya sama sekali tidak. Kita bisa menjadikan pengalaman-pengalaman negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara di Eropa sebagai cermin apabila kita ingin memajukan pertanian di Indonesia.

Pertanian mempunyai tugas paling mendasar yaitu menghidupi umat manusia dan menggerakkan perekonomian di wilayah rural. Maka indikator keberhasilannya adalah produktivitas yang tinggi baik kuantitas maupun kualitas dan manfaat ekonomi yaitu menyediakan lapangan kerja bagi masyarakat di kawasan sekitarnya yang rata-rata aksesibilitas terhadap pendidikan masih sangat terbatas. Angkatan kerja dalam kelompok ini tidak mudah mengakses dan menembus kebutuhan tenaga kerja di sektor-sektor manufaktur yang membutuhkan pengetahuan dan *skill* yang lebih memadai. Bagi sekelompok anggota masyarakat tertentu, bekerja di sektor pertanian menjadi satu-satunya pilihan. Untuk itu maka sektor pertanian tidak boleh gagal dalam menjalankan kegiatan usahanya agar dapat menjamin fungsinya

sebagai sumber pendapatan bagi pemiliknya, mensejahterakan para pemangku kepentingannya dan berfungsi aktif dalam mengelola dan menjaga kelestarian sumberdaya alam.

Indonesia adalah satu diantara sedikit negara yang memperoleh anugerah kemewahan sumberdaya alam. Kondisi agroklimat dan kesuburan tanahnya memungkinkan begitu banyak ragam spesies tanaman dapat tumbuh, berkembang dan berproduksi secara baik. Anugerah ini pula yang mengundang kepentingan kolonial berbondong-bondong masuk ke Indonesia yang dahulu disebut dengan Hindia Belanda pada era tahun 1800-an. Pertanian utamanya perkebunan di tanah Nusantara bermula dari investasi pada masa itu oleh beberapa negara dari benua Amerika, Eropa dan bahkan beberapa negara dari benua Asia menyusul dibukanya terusan Suez. Pengembangan perkebunan di Nusantara pada masa itu dipastikan sangat menguntungkan jika dilihat dari peninggalan-peninggalan yang tersisa hingga saat ini. Jaringan transportasi yang kita warisi hingga saat ini seperti jalan raya, pelabuhan dan jaringan rel kereta api adalah artefak peninggalan sejarah perusahaan perkebunan di bumi pertiwi pada masa kolonial.

Pandangan atau pemahaman bahwa pertanian adalah kegiatan manusia yang sangat kompleks dan sangat fundamental bagi kemerdekaan dan kemerdekaan suatu bangsa lahir dari Abraham Lincoln (Abe). Pemikiran Abe membuahkan *Morrill Act*

pada tahun 1862, yaitu landasan hukum yang kemudian dipergunakan sebagai dasar pendirian *Land Grant University* di Amerika Serikat. Universitas-universitas ternama seperti University of Illinois; Michigan State University, Cornell University, University of Michigan, dan universitas-universitas besar di AS sebagian besar berasal dari *land grant university*. Lahirnya *land grant university* menjadi tonggak penting dalam pengembangan pendidikan tinggi sekaligus pengembangan pertanian di Amerika Serikat. Persoalan berikutnya adalah bahwasanya untuk mengembangkan pertanian dan memberdayakan perekonomian petani diperlukan lahan, maka pada tahun 1862 dirumuskanlah *Homestead Act* dimana negara menjual tanah kepada petani dengan harga yang murah sebagai aset hak milik petani dengan unit luasan masing-masing 65 hektar jauh dibandingkan dengan 2 ha yang dijadikan sebagai unit dasar pengelolaan pertanian rakyat di Indonesia yang sudah dianggap ekonomis.

Seperti halnya yang dialami perusahaan pertanian atau perkebunan, yang menjadi nasabah dari banyak keputusan di luar sektor pertanian itu sendiri, memajukan pertanian di Indonesia tidak cukup dengan menggunakan ilmu, teknologi dan budaya pertanian semata-mata. Membangun pertanian juga membutuhkan reformasi di bidang perbankan, perbaikan infrastruktur, teknologi informasi dan sebagainya. Diperlukan keluasaan pandangan dan sikap terbuka bekerjasama antar sektor

agar pertanian benar-benar dapat menjadi penopang perekonomian negara dalam arti yang sebenarnya. Pada tahun 1820 ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, pendapatan perkapita rakyat Hindia Belanda tercatat dua kali lipat dibandingkan dengan Taiwan yang sekarang sudah bertransformasi menjadi negara industri yang maju. Menurut catatan IMF pada tahun 2015 pendapatan perkapita Indonesia di aras USD 3.362 per kapita per tahun, kurang dari sepersepuluh pendapatan perkapita Taiwan pada tahun yang sama (Pakpahan, 2016).

Pertanian adalah induknya peradaban, namun eksploitasi perekonomian berbasis pertanian pada masa kolonial melahirkan peradaban yang kurang sempurna walaupun tidak boleh disebut sebagai peradaban yang cacat. Polarisasi yang dikembangkan pemerintahan kolonial antara wilayah usaha kebun (*upstream*) di satu sisi dan pengolahan (*downstream*) di sisi lainnya terstigma kuat pada pelaku agribisnis kita bahkan hingga masa sekarang. Hal ini melengkapi pemahaman yang keliru tentang aset (semu) yaitu Hak Guna Usaha yang ketika aktif dalam pengelolaan korporasi menjadikan investasi di perkebunan menjadi sangat murah. Persoalan baru akan muncul jika harga komoditas turun, sekali lagi harga komoditas yang turun, bukan produk olahannya, karena harga produk olahan dipastikan lebih stabil. Jika harga komoditas turun, putaran usaha akan mengecil dan jika ini

berlangsung lama maka hal ini akan menjadi persoalan yang hampir mustahil untuk diselesaikan dengan asumsi, logika dan budaya pertanian semata-mata. Hal ini pula yang menjadikan perusahaan perkebunan tidak pernah bersungguh-sungguh mengembangkan industri hilirnya karena nyaman dengan mengelola Hak Guna Usaha dengan tanaman perkebunan di atasnya, dimana produk primernya masih menjadi kebutuhan industri yang lebih hilir. Pada masa kolonial, memang hanya bahan baku industri yang tidak tahan lama yang kemudian dibuatkan industri pengolahannya, sementara yang lainnya diexport dalam bentuk produk primer. Hal ini yang sekarang dilanggengkan oleh sebagian pelaku usaha perkebunan di masa kini. Kesadaran dan pemahaman yang menyeluruh akan hal-hal seperti diataslah yang harus dimiliki oleh pemangku kepentingan yang bertanggung-jawab dalam pengembangan perkebunan di Indonesia.

Hadirin sekalian yang saya muliakan.....

Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pandangan tentang pertanian Indonesia, dengan fokus pada tanaman perkebunan dan apa yang sudah dan dapat dilakukan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada untuk berkontribusi menemukan solusinya.

Industri perkebunan Indonesia berada di persimpangan jalan, keadaanya sudah tidak seperti 50-tahun yang lalu. Permasalahan

lahan garapan, tata ruang, modernisasi, umur tanaman, perubahan iklim, tata kelola air serta kesenjangan sosial, adalah persoalan-persoalan yang tak kunjung dapat diselesaikan dan bahkan semakin mendorong kepada ketidak-pastian arah dan membebani laju pengembangan pertanian di Indonesia. Konversi lahan berjalan terus menerus, baik diperuntukkan bagi kepentingan pertanian maupun kepentingan non pertanian. Hal ini memberikan implikasi ketidakfokusan pada komoditas tertentu yang menjadi kompetensi utama selama bertahun-tahun, berpotensi pada investasi yang berubah-ubah yang akan melemahkan kemampuan usaha dalam menghasilkan manfaat yang optimal dalam jangka panjang.

Tulisan ini dimaksudkan untuk memberikan pandangan dari sisi yang berbeda terkait dengan keniscayaan bahwa bisnis perkebunan di Indonesia terpinggirkan. Bahkan keadaan yang lebih buruk dialami oleh perusahaan-perusahaan yang bertumpu pada komoditas perkebunan yang dewasa ini , di kacamata banyak pengamat kurang populer seperti teh, kakao, dan sebagainya. Komoditas-komoditas ini selama lebih dua dasawarsa terakhir dianggap sebagai komoditas yang gagal bagi para pengelola perkebunan untuk mananggung keuntungan. Harga komoditas yang buruk sering dijadikan sebagai sebab utama bagi para produsen (perusahaan perkebunan) dibalik buruknya kinerja teh dan kakao dalam mendulang pendapatan. Sementara di mata

pembeli lemahnya daya juang harga teh Indonesia di pasaran dunia adalah karena rendahnya kualitas teh Indonesia ditengah melimpahnya pasokan teh di pasar dunia yang dihasilkan baik dari negara debutan baru dan peningkatan produktivitas dari produsen lama.

Bapak, Ibu hadirin yang saya muliakan....

Di Indonesia pengelola perkebunan dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok besar, yaitu perkebunan negara, perkebunan swasta, dan perkebunan rakyat. Untuk beberapa komoditas tertentu, perkebunan rakyat mendominasi baik luasan maupun produksinya. Namun demikian perkebunan rakyat di Indonesia selalu identik dengan rendahnya produktivitas dan kualitas. Upaya-upaya untuk membangun budaya industrial di perkebunan rakyat sudah banyak dilakukan, misalnya dengan program kemitraan namun belum menghasilkan hasil seperti yang diharapkan. Sementara itu, di beberapa negara penghasil komoditas perkebunan, produk yang dipasarkan di pasar dunia sebagian besar justru dihasilkan dari kebun rakyat, dan yang menarik adalah kualitas produk yang mereka hasilkan sangat bagus, bahkan tidak kalah dibandingkan dengan komoditas yang sama yang dihasilkan oleh perkebunan negara dan perkebunan swasta di Indonesia.

Di Kenya, Pantai Gading, bahkan di Uganda negeri-negeri yang merdeka jauh setelah republik ini mendeklarasikan

kemerdekaannya mempunyai system mengelola usaha tani yang sangat baik. Setelah melakukan nasionalisasi terhadap aset-aset perkebunan ex kolonial, pemerintah di negeri-negeri di Afrika tersebut segera menyadari bahwa pemerintah sangat tidak mungkin mengelola perkebunan dengan baik. Segera setelah nasionalisasi pemerintah segera melakukan privatisasi dan membentuk badan-badan yang mengelola perkebunan tersebut. Negara mengelola perkebunan melalui dewan komoditas. Sebagai catatan komoditas perkebunan bagi negara-negara dimaksud adalah penyumbang devisa yang utama, sehingga dengan demikian perkebunan adalah sektor yang sangat strategis (KTDA, 2015).

Berbeda dengan di Indonesia, di Indonesia regulasi mengamankan pengelolaan aset-aset strategis dilakukan oleh pemerintah untuk sebesar-besarnya manfaat bagi rakyat, sehingga banyak sektor yang dipandang strategis masih dikelola oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurut catatan Bank Dunia, Indonesia sekarang- ini adalah satu diantara sedikit negara atau bahkan satu-satunya Negara yang masih mengelola perkebunan-perkebunan besar melalui perusahaan Negara. Sebagai tambahan catatan, di Indonesia dewan komoditas dan lembaga penelitian dan pengembangan perkebunan tidak berkembang oleh karenanya.

Indonesia juga menjadi satu-satunya Negara dimana sumberdaya alam melimpah, potensi dan capaian produksi tinggi, namun lebih banyak mengexport bahan baku dari pada mengembangkan pengolahannya. Jika bercermin pada pengalaman banyak negara penghasil komoditas perkebunan, umumnya pengembangan industri berbahan baku komoditas menjadi prioritas untuk dilakukan demi mengambil manfaat yang lebih besar dalam *value chain* produk perkebunan. Dengan cara ini maka akan lebih meningkatkan kepastian bagi pelaku usaha perkebunan di wilayah yang lebih hulu untuk menyerap produk yang mereka hasilkan.

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dan peningkatan kesejahteraan pelaku usaha perkebunan.

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada sudah sejak lama menyadari pentingnya perkebunan bagi perekonomian negara. Komoditas perkebunan pula yang menjadi daya tarik kaum kolonial menguasai Nusantara selama berabad-abad. Perkebunan pula yang menjadikan perekonomian Nusantara (dahulu Hindia Belanda) melambung melampaui beberapa negara yang sekarang dikenal sebagai negara industri maju dan itu adalah karena perkebunan.

Kesadaran akan pentingnya perkebunan bagi perekonomian negara, dan bahwasanya Indonesia sudah mempunyai catatan

yang baik tentang kualitas produk yang dihasilkan mengundang Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada untuk memberikan perhatian istimewa dan berniat menyelenggarakan pendidikan dan penelitian untuk mendukung pengembangannya. Keputusan untuk mengambil prakarsa dan peran besar dalam pengembangan perkebunan di Indonesia dimulai sejak tahun 1963. Pada saat itu Dekan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada, Ir. Soedarsono Hadisaputro mengajukan permohonan kepada pemerintah untuk mendapatkan lahan bagi kepentingan pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu pendidikan dan penelitian di bidang perkebunan.

Setelah beberapa tahun sebelumnya gagal memperoleh lahan perkebunan Getas Asinan yang ketika itu diusahakan oleh PPN (sekarang menjadi RC Getas) maka Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada berusaha untuk mendapatkan alternatif penggantinya. Upaya ini kemudian mengarah kepada lahan perkebunan Pagilaran yang sebelumnya dikelola oleh PT. Pemanukan & Tjiasem Lands (PnT lands) yang Hak Guna Usahanya berakhir pada tahun 1963. Upaya tersebut membuahkan hasil dan permohonan Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dikabulkan.

Timbang terima perkebunan Pagilaran dari penguasa PT. Pemanukan & Tjiasem Lands kepada Fakultas pertanian Universitas Gadjah Mada dilakukan pada tahun 1964 dan itu

menandai permulaan sejarah yang cukup panjang bagi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dalam kiprahnya di bidang perkebunan. Dengan demikian jelas bahwa Perkebunan Pagilaran (dan sekarang beserta segala sesuatu yang merupakan hasil pengembangannya) adalah ***fasilitas pendidikan dan penelitian di bidang perkebunan*** yang ***dikelola secara profesional*** yang seharusnya merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fasilitas-fasilitas pendukung Tridharma Perguruan tinggi yang ada di Fakultas Pertanian. Dengan luas lahan yang lebih dari 1000 ha, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada terniscayakan harus mengelolanya sebagai entitas usaha yang produktif dan tidak boleh merugi. Hal ini membawa kepada pilihan untuk tetap mengelolanya sebagai aset komersial yang produktif dan dikelola oleh PT. Pagilaran. Namun hal ini terkendala oleh ketentuan perundangan yang termuat dalam UUPA tahun 1950 yang menyatakan bahwa pengelola hak Guna Usaha haruslah sebuah Badan Hukum. Fakultas Pertanian UGM, oleh karenanya tidak memenuhi syarat dimaksud. Maka agar supaya kemanfaatan yang semula diharapkan sebagai fasilitas pendukung dan pendidikan penelitian tidak berubah maka ketentuan perundangan yang ada dipenuhi (de jure) dengan mengembalikan HGU kepada negara, selanjutnya PT. Pagilaran memohon pengelolaan Hak Guna Usaha kebun Pagilaran dan permohonan tersebut dikabulkan. Selanjutnya kebun Pagilaran dikelola dengan visi dan misi untuk mendukung tidak saja dharma pendidikan dan

penelitian, namun juga pengabdian yang nyata terhadap masyarakat pelaku usaha perkebunan. Seiring dengan proses itu, PT. Pagilaran juga memperoleh Hak Guna Usaha lain seluas 208 ha di Segayung Utara, Kabupaten Batang Jawa Tengah untuk kemudian dikembangkan sebagai perkebunan kakao.

Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada dengan demikian menjadi satu-satunya Fakultas Pertanian di Indonesia atau bahkan mungkin juga satu-satunya di dunia yang memiliki keunikan ini dengan terjun langsung dalam pengelolaan bisnis perkebunan secara profesional, mulai dari pengelolaan tanah, tanaman, organisme pengganggu tanaman (OPT), pengolahan (*manufacture*) di pabrik, *quality assurance*, *packaging*, sumberdaya manusia, permodalan, keuangan hingga pemasaran baik domestik maupun ekspor.

Dengan tetap berpegang teguh pada nilai-nilai ke-gadjah-mada-an, Fakultas Pertanian UGM juga mengejawantahkan semangat membangun perkebunan rakyat dengan menyediakan diri menjadi agen pengembangan perkebunan rakyat melalui pendampingan nyata dan terlembagakan melalui Program Kemitraan PIRBUN untuk komoditas teh dengan Unit Produksi Pagilaran sebagai inti dan kakao dengan unit produksi Segayung Utara sebagai inti. Sebuah keputusan luar biasa bagi sebuah perusahaan swasta seperti Pagilaran dengan keputusannya untuk

membangun kebun teh rakyat di berbagai lokasi, dengan hanya mengandalkan satu kebun sebagai inti.

Sebagai catatan, biasanya perusahaan inti membangun satu kebun plasma setelah mempunyai beberapa kebun dan pabrik inti, dan hasil pucuk teh dari kebun plasma diolah di pabrik inti, dan tidak dipersiapkan pabrik tersendiri yang khusus mengolah bahan baku dari petani plasma. Namun tidak demikian dengan PT. Pagilaran, 4 pabrik berskala ekonomis setara dengan pabrik inti dibangun di empat lokasi pengembangan kebun plasma yaitu di kabupaten Batang, Pekalongan, dan Banjarnegara di Provinsi Jawa Tengah dan satu pabrik teh hijau di Kabupaten Kulon Progo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini dilakukan sebagai wujud komitmen Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada bahwa petani perkebunan tidak saja cukup diberdayakan tetapi juga harus didampingi dan dipihaki. Sampai suatu saat terbangun jiwa kewirausahaan di kalangan petani perkebunan sehingga pada saat itu PT. Pagilaran dan petani plasma binaan dapat duduk sejajar sebagai partner bisnis yang harmonis dan berbagi manfaat secara lebih bermartabat.

Harus diakui, bahwasanya sebenarnya bukan hal yang ringan mempertahankan komitmen bermitra dengan petani perkebunan, apalagi ketika usia kemitraan sudah cukup tua dan beberapa asumsi yang dipergunakan oleh para pemangku kepentingan untuk berkomitmen sudah tidak lagi relevan. Banyak tokoh-tokoh

baru di kalangan petani, pegawai Dinas, LSM dan bahkan pejabat di kementerian terkait yang ahistori terhadap program PIRBUN, namun aktif membuat pernyataan yang hanya berdasarkan logika dan mengganggu kenyamanan dalam bermitra. Namun demikian Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada tetap mengamanatkan untuk terus mempertahankan kemitraan karena dibalik carut-marutnya kemitraan tersembunyi wajah perkebunan rakyat yang sesungguhnya. Lain daripada itu, Kemitraan di PT. Pagilaran adalah Pengembangan PIR satu-satunya yang masih berjalan dengan format aslinya baik dalam komoditas teh maupun kakao.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Bahwasanya komitmen kemitraan masih terjaga hingga saat ini membuktikan adanya keseriusan yang luar biasa bagi Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada melalui PT. Pagilaran dalam mensejahterakan petani. Dengan mengalami jatuh-bangun seiring dengan perjalanan permasalahan dunia nyata perkebunan, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada terus mempertahankan keberpihakan PT. Pagilaran kepada petani dengan tetap menjadi mitra bisnis yang setia sambil terus berupaya mencari jalan bagi perbaikan format kemitraan yang lebih bermartabat, menempatkan pihak-pihak yang bermitra dalam kesetaraan yang sesungguhnya. Membangun perkebunan bersama, mengelola perkebunan bersama, tumbuh dan

berkembang bersama, serta berbagi manfaat bersama secara lebih berkeadilan.

Kenyataan bahwa luasan lahan yang dimiliki masing-masing keluarga petani tidaklah besar, maka pengembangan kolektivitas dengan berbagai bentuk harus terus diperjuangkan. Fakultas Pertanian UGM melalui PT. Pagilaran telah memilih bentuk kemitraan seperti yang berjalan hingga saat ini. Pemikiran tentang kolektivitas lahan bukanlah hal yang baru, sebelumnya telah berkembang pemikiran tentang pertanian hamparan di subsektor tanaman pangan. Pidato Bung Karno tahun 1952 di atas juga sudah menyingung tentang penyatuan lahan petani secara fisik dengan menghilangkan pematang-pematang.

Jika dibandingkan dengan tanaman pangan, tanaman perkebunan sebenarnya mempunyai peluang lebih besar dalam mewujudkan kolektivitas lahan dan menggeser fokus pengelolaan usaha tani dari sebelumnya pada lahan menjadi kesatuan capital di aras kelompok. Kebersamaan ini telah terbukti menghasilkan catatan export yang cukup besar sehingga PT. Pagilaran dinominasikan menjadi perusahaan yang memperjuangkan pengembangan merk global oleh kementerian Perdagangan pada tahun 2009, menyusul penempatan PT. Pagilaran pada urutan kedua exporter teh pada tahun 2008 setelah PTPN VIII oleh beberapa media.

Komitmen tentang kemitraan dengan petani perkebunan melalui program PIRBUN yang masih terpelihara dan terus berkembang dianggap menarik bagi majalah SWA dan kemudian menganugerahkan kepada PT. Pagilaran penghargaan **Social Entrepreneurship Award** pada tahun 2010. Kepentingan banyak pihak terkait dengan import produk pertanian menjadikan niat luhur untuk mengembangkan pertanian di Indonesia dan memajukan petani Indonesia tidak mudah untuk diwujudkan.

Namun beruntung Fakultas Pertanian UGM dengan modal pemikiran dan kiprah yang panjang di dunia nyata agribisnis perkebunan dan karena mempunyai dan mengelola PT. Pagilaran menjadikan Fakultas Pertanian UGM selalu punya ruang untuk terus mengembangkan pemikiran dan aspirasinya. Keberadaan PT. Pagilaran menjadi pilihan yang sempurna bagi keputusan untuk tetap menjadikan perkebunan dapat dipertahankan kedaulatannya di kawasan pedesaan. Pemasaran menjadi kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan agribisnis. Kita sama-sama ketahui bahwa produsen komoditas (petani, perusahaan perkebunan) bukanlah penentu harga produk yang dihasilkan dari kegiatan usaha yang dijalankannya. Baik dari sisi komponen biaya maupun harga jual produk, produsen selalu menjadi nasabah dari produk-produk keputusan di luar manajemen yang dikelolanya. Sehubungan dengan hal tersebut, menjadi *offtaker* bagi produk perkebunan yang dihasilkan oleh petani plasma menjadi bagian yang dikomitmenkan oleh PT. Pagilaran untuk memastikan

kegiatan usaha perkebunan rakyat anggota kelompok tani plasma dapat terus berlangsung dan berkembang. Dengan pemasaran yang bagus inilah kemampuan untuk menjembatani petani dan pasar dapat terus dikembangkan.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Seperti kita ketahui bersama, industri pertanian, utamanya yang melibatkan produksi bahan baku di tingkat kebun, bukanlah kegiatan usaha yang mendapatkan prioritas utama bagi perbankan untuk dibantu pendanaanya baik untuk kepentingan investasi maupun modal kerja. Sementara untuk meningkatkan kegiatan usaha perlu tambahan modal guna meningkatkan produktivitas dan kualitas produk sekaligus.

Dengan memanfaatkan kekuatan di pemasaran dan kepercayaan dari mitra usaha, PT. Pagilaran berusaha terus meningkatkan putaran usaha untuk mengkompensasi absennya kehadiran lembaga pendanaan sekaligus pada saat yang sama memaksimalkan produktivitas kebun petani dengan berbagai cara. Upaya peningkatan produksi perkebunan rakyat dilakukan juga melalui kerjasama dengan beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat lokal maupun internasional serta CSR perusahaan mitra dan pembeli. Produk teh dari petani tersebut kemudian bersama dengan teh yang disuplai dari perusahaan-perusahaan perkebunan mitra Pagilaran dipergunakan untuk mendongkrak

omset usaha, memaksimalkan potensi pasar yang dimiliki perusahaan. Hasil dari proses ini ternyata di luar ekspektasi kami, karena hal ini mampu memperbaiki arus kas perusahaan, memastikan pembayaran pucuk teh dan biji kakao dari petani dan yang pasti adalah menyisakan keuntungan laba bagi pengembangan kegiatan usaha perusahaan dan meningkatkan jaminan pasar bagi produk teh dan biji kakao yang disuplai dari petani plasma mitra PT. Pagilaran. Perdagangan dengan demikian merupakan jalan keluar yang *manageable* untuk menjamin kelangsungan usaha perkebunan rakyat melalui program kemitraan dan memastikan arah pengembangannya seiring dengan dinamika asumsi-asumsi bisnis perkebunan yang berjalan sangat cepat dan membutuhkan keputusan-keputusan manajemen yang juga cepat.

Banyak laporan menyebutkan bahwa produktivitas kebun petani Plasma menurun segera setelah diserahkan kepada petani. Penurunan ini disebabkan oleh banyak hal utamanya adalah karena menurunnya standar kultur teknis pengelolaan tanaman hingga yang paling parah adalah karena kematian tanaman yang menyebabkan populasi menurun secara drastis sehingga berkonsekuensi pada penurunan produksi yang juga signifikan.

Upaya untuk melakukan penyegaran tentang kultur teknis budidaya pada tanaman teh dan kakao terus dilakukan oleh PT.

Pagilaran yang didukung oleh pakar-pakar tanaman perkebunan terkait dari Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada. Salah satu kegiatan adalah sekolah lapang teh yang dilakukan di unit produksi Plasma Sidoharjo. Sekolah lapang ini diinisiasi oleh PT. Pagilaran dengan melibatkan narasumber-narasumber dari Fakultas Pertanian UGM yang sesuai dengan kompetensinya menata ulang standar operasional prosedur pengelolaan tanaman Teh.

Program ini menasar 11.531 petani Teh di Kabupaten Batang yang terorganisir dalam 77 kelompok tani dan 4 koperasi. Pada saat program dimulai *assessment* di tingkat kebun mendapatkan data bahwa populasi per hektar tanaman teh di Kabupaten Batang adalah rendah, sekitar 3.000 sampai 4.000 tanaman per-hektar. Kondisi ini menurun lebih dari 50% dari populasi sebelumnya pada saat diserahkan dimana populasi pada saat itu rata-rata adalah 10.000 tanaman per hektar. Sebagian besar kelompok tani juga dalam keadaan tidak aktif. 100 orang petani terpilih untuk menjadi agen pengembangan dan dilatih dalam sekolah lapang petani selama 32 hari kerja efektif. Materi dalam sekolah lapang mencakup semua aspek budidaya tanaman teh, manajemen kelompok tani, serta tata cara rehabilitasi kebun. Program ini juga didukung oleh Business Watch Indonesia (BWI) dan Dinas Perkebunan Kabupaten Batang. IDH (2013) melaporkan bahwa program ini menunjukkan perbaikan dalam beberapa hal sebagai berikut:

1. Produktivitas meningkat antara 30-75% sesuai dengan kualitas kelompok tani yang mengelolanya;
2. Harga meningkat 20-30% mengikuti peningkatan kualitas pucuk yang dihasilkan;
3. Pendapatan petani mengalami kenaikan 60-70%;

Program ini sekaligus juga didedikasikan untuk menjadikan unit produksi Sidoharjo sebagai unit Plasma yang pertama kali diaudit dengan standar sertifikasi Lestari. Biaya yang muncul sebagai konsekuensi dari audit dimaksud sepenuhnya dapat dipenuhi dari tambahan pendapatan yang diperoleh dari peningkatan produksi baik kuantitatif maupun kualitatif.

Hadirin sekalian yang saya hormati.....

Berikut ini saya akan mengutip laporan rapid appraisal yang didanai oleh Bank Dunia atas permintaan kementerian perdagangan guna mendapatkan rekomendasi bagi pemerintah Republik Indonesia dalam menata ulang industri teh di Indonesia. Dalam laporan tersebut dimuat beberapa *lesson learned* yang diambil dari upaya-upaya yang dilakukan PT. Pagilaran untuk mengembalikan potensi kebun teh rakyat di Jawa Tengah. Para peneliti yang didanai oleh Bank Dunia tersebut membuat laporan berdasarkan pengalaman PT. Pagilaran dalam memulihkan populasi pada kebun produktif yang sudah berumur 50-100 tahun

dan masih terkelola dengan baik. Rehabilitasi dilakukan dengan dua cara, dengan biaya yang murah dan cepat membuahkan hasil (de Wolf, 2013).

Selanjutnya de Wolf menyatakan bahwa PT. Pagilaran dipandang telah berhasil memproduksi bibit untuk kepentingan *infilling* dengan metode cangkok dan mediseminasi kepada masyarakat petani plasma sebagai solusi rehabilitasi kebun dengan biaya yang lebih murah. Dengan cangkok, maka risiko kematian pada tanaman baru yang disisipkan dapat diminimalkan. *Infilling* dilakukan pada saat tanaman di blok yang bersesuaian jatuh pada giliran pangkas. Bibit dari hasil cangkok dipilih sedemikian rupa dari perdu-perdu yang mempunyai catatan produktivitas yang tinggi dan dibuat dengan ketinggian minimal 50 cm dari. Dengan cara ini dalam kurun waktu kurang dari 2 tahun, tanaman baru yang disisipkan sudah menjadi tanaman menghasilkan (TM). Memang semula ada sedikit kekhawatiran terkait dengan perkembangan perakaran dari tanaman hasil cangkok. Namun sejauh ini bahkan setelah mengalami kekeringan yang ekstrim pada tahun 2015, tidak ada tanaman hasil cangkok yang mengalami kematian. Metode ini didesain utamanya untuk memastikan petani teh melakukan rehabilitasi kebunnya tanpa harus khawatir akan mengeluarkan biaya yang tinggi. Dengan metode ini biaya rehabilitasi akan turun hingga Rp. 10.000.000 per hektar karena penghematan tenaga kerja dan sarana produksi,

sementara di sisi lain petani tidak harus menunggu terlalu lama untuk bisa mendapatkan perbaikan produksi dan pendapatan.

Metode lain yang menarik perhatian peneliti Bank Dunia dalam rangka rehabilitasi perkebunan teh adalah *compacting* yang mengkombinasikan antara rehabilitasi dan *replanting*. Tanaman dewasa dari kebun berpopulasi rendah dipindahkan secara hati-hati ke kebun-kebun yang akan direhabilitasi untuk meningkatkan populasi tanaman hingga mencapai standar yang ideal yaitu 10.000 per ha. Dengan cara ini maka, sekaligus akan didapat areal untuk melakukan *replanting*, sehingga rehabilitasi dan *replanting* dapat dijalankan secara seiring dengan tingkat keberhasilan yang lebih baik. Petani yang mengimplementasikan metode ini akan berhemat biaya lebih dari 25% dan akan segera mendapatkan kebun produktif dengan risiko kematian bibit yang minimal (de Wolf, 2013).

Sertifikasi *Rainforest Alliance* di kebun petani Plasma

Mulai tahun 2015 PT. Pagilaran mewujudkan niat untuk mendorong produk petani mitra untuk masuk ke pasar export. Sehubungan dengan persyaratan untuk memasuki pasar export adalah dengan sertifikasi proses produksi dan produk. Pada tahun 2015 unit produksi yang dipilih untuk diperjuangkan mendapatkan sertifikasi *Rainforest Alliance* adalah Unit Produksi Kaliboja. Unit produksi ini sebelumnya, sejak tahun 2009 sudah dipersiapkan

menjadi kandidat unit produksi plasma yang dapat mensubstitusi unit produksi inti.

Pada tahun 2009, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada bekerja sama dengan Yayasan Unilever Peduli membantu petani plasma di daerah Banjarnegara dan Pekalongan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi teh. Kerjasama ini telah secara luar biasa berhasil meningkatkan produktivitas perkebunan teh rakyat di sekitar Unit Produksi Kaliboja melampaui 100%. Dengan modal ini, dan masih atas dukungan PT Unilever sebagai offtaker utama teh Kaliboja, Unit Produksi Kaliboja berhasil memperoleh sertifikat rainforest alliance dengan baik. Ini juga merupakan salah satu wujud kerjasama yang baik antara Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada melalui PT. Pagilaran dan komitmen yang kuat antara dua pemangku kepentingan yang bersepakat untuk bermitra. Petani di Kaliboja dengan demikian menjadi kelompok tani teh pertama yang mendapatkan sertifikat internasional pertanian lestari, Rainforest Alliance.

Upaya mendukung petani teh untuk mendapatkan legalitas ecport dan mengisi produk domestik berorientasi export sudah dimulai oleh PT. Pagilaran sejak tahun 2008 dengan membentuk kelompok referensi nasional (NRG) untuk komoditas teh bekerjasama dengan beberapa LSM baik domesik maupun internasional (PT. Pagilaran ,2011^a).

Upaya ini membuahkan hasil dengan dibentuknya kandidat sertifikasi domestik pertanian berkelanjutan yang kemudian dinamakan dengan **Sertifikasi Lestari**. Upaya lebih lanjut untuk menjadikan sertifikasi lestari menjadi mandatori tidak menemukan jalan yang mudah. Namun demikian salah satu unit produksi plasma yaitu Unit Produksi Sidoharjo berhasil memperoleh Sertifikat Lestari di bidang teh untuk yang pertamakali di Indonesia, pada kesempatan kali itu kembali Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada melalui PT. Pagilaran *me-launching* produk teh kemasan yang merupakan produk bersama antara PT. Pagilaran dengan koperasi petani teh di Kabupaten Batang dengan merk Kepodang (PT. Pagilaran, 2011). Upaya untuk mendukung unit produksi plasma mendapatkan sertifikat pertanian berkelanjutan terus dilakukan dan pada tahun 2016 Unit Produksi Jatilawang dipromosikan menjadi lokomotif export baru dengan basis teh hijau untuk memenuhi besarnya permintaan pasar akan produk teh hijau sementara produksi teh hijau relatif terbatas dibandingkan dengan pertumbuhan pasarnya. Peluang inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh PT. Pagilaran untuk mengangkat Unit Produksi Jatilawang yang ditopang oleh kemitraan dengan petani teh di Kabupaten Banjarnegara menjadi pengisi komponen blend bagi merk-merk besar di pasar internasional. Bahwasanya ada tuntutan peminum teh di negara-negara pengimport akan produk yang diproses secara sehat, tepat cara dan berkeadilan itu menjadi konsekuensi logis dari keputusan untuk masuk ke

segmen pasar dimaksud. Sehubungan dengan hal tersebut, ditargetkan petani-petani teh di Banjarnegara yang menopang produksi Unit Produksi Jatilawang mulai dipersiapkan dan didampingi agar supaya dapat lolos pada audit perdana sertifikasi ***Rainforest Alliance***.

Ditengah perekonomian dunia yang sedang tidak menentu, harga komoditas yang terjaga di aras yang tidak memungkinkan industri perkebunan untuk berinvestasi, inovasi di aras produk dan proses untuk meningkatkan nilai tukar produk perkebunan terus dilakukan. Untuk melakukan deferensiasi produk sekarang sedang dilakukan pengembangan proses pengolahan teh di pabrik dengan membuat teh leavy dan berbasis organik. Dengan cara ini diharapkan akan diperoleh nilai tukar yang lebih baik dan memberi peluang kepada petani untuk mengambil bagian dalam program ini yang memungkinkan terjadinya kenaikan harga pucuk teh yang disuplai ke PT. Pagilaran.

Isu mengenai penerapan integrated farming juga menjadi kajian dan sedang terus didalami dengan fokus utama untuk berbagi sumberdaya antar subsektor sehingga kegiatan usaha perkebunan menjadi lebih menjanjikan tambahan manfaat karena saling mensubsidi antar subsektor.

Di masa lalu industri perkebunan mengeluhkan beratnya menanggung banyaknya jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan sehingga tidak efisien. Di berbagai perusahaan permasalahan ini

selesai dengan sendirinya tanpa upaya penyelesaian yang berarti. Hal ini karena sebagian karyawan sudah memasuki masa purna tugas dan sebagian lagi meninggalkan industri perkebunan demi bekerja di perkotaan atau demi pendapatan yang lebih baik. Dewasa ini di beberapa pos pekerjaan di perkebunan sudah dirasakan adanya kekurangan tenaga kerja dan jika industri perkebunan mengambil keputusan untuk meremajakan sumberdaya manusianya, maka harus didahului atau setidaknya dibarengi dengan elaborasi masuknya teknologi. Tanpa modernisasi maka perkebunan tidak akan efisien. Namun jika efisiensi menjadi tujuan utama, maka serapan sumberdaya manusia di industri perkebunan akan minimal dan ini tidak dapat dianggap sebagai keberhasilan subsektor perkebunan, meskipun secara finansial perusahaan membukukan laba yang besar. Esensi pemerdekaan masyarakat pedesaan dari kekhawatiran kehilangan pekerjaan yang pada gilirannya akan bermuara pada kegagalan menghidupi keluarga harus dipastikan menjadi prioritas utama. Disadari atau tidak sektor pertanian dalam arti yang luas mempunyai mandat secara otomatis untuk menampung angkatan kerja dengan tingkat pendidikan yang beragam, mulai yang sangat rendah hingga mereka yang berpendidikan cukup. Sebuah keniscayaan yang tidak dapat dihindari dan tidak dijumpai pada usaha di sektor yang lain.

Hadirin sekalian yang saya hormati.....

Modernisasi perkebunan adalah pilihan yang tidak dapat dihindari, karena tanpa itu maka generasi muda petani terpelajar sulit terbentuk, namun jika modernisasi tidak menimbang aspek sosial maka perkebunan akan kehilangan salah satu fungsi utamanya di daerah pedesaan. Solusi dari permasalahan ini sebenarnya ada pada pola kemitraan yang desain ulang dengan fokus pada pengembangan *social enterprenurship* yang memungkinkan masyarakat pedesaan dapat bermitra dengan perusahaan perkebunan sebagai pemasok sarana produksi, partner dalam penyediaan sarana transportasi, atau bekerjasama membentuk entitas bisnis baru bersama perusahaan mitra dengan fokus di luar fokus bisnis perusahaan inti. Dengan demikian lapangan kerja tetap tersedia tanpa harus muncul kekhawatiran akan adanya tambahan beban bagi perusahaan inti karena menanggung beban pengupahan pekerja yang besar, namun juga tidak menjadi menara gading di tengah sekumpulan masyarakat yang kesulitan mendapatkan lapangan kerja (PT. Pagilaran 2013).

Hadirin sekalian yang saya hormati.....

Memproduksi apa yang dijual..

Menjual apa yang diproduksi itu perilaku normatif petani, menyusul keputusan mereka untuk memproduksi komoditas tertentu yang sedang populer. Namun permasalahan akan muncul

ketika harga komoditas turun atau pembeli sedang tidak berniat membeli, maka harga akan semakin turun. Dewasa ini PT. Pagilaran tidak lagi menggunakan *mindset* tersebut, karena produksi tanaman perkebunan tidak mengenal kata libur. Adanya jeda waktu akan memunculkan permasalahan kualitas selain karakteristik pembiayaan perkebunan yang juga bersifat harian. Oleh sebab itu maka kepastian adanya penjualanlah yang dibuat terlebih dahulu, maka dengan demikian produksi akan meemukan alasannya untuk dilakukan, selain target omzet dan mergin yang lebih dapat direncanakan.

Demi meningkatkan rasa aman dari dampak fluktuasi harga produk perkebunan, maka diversifikasi ke arah vertikal menjadi sebuah keharusan. Melakukan bisnis komoditas di aras bahan baku hanya memberikan potensi margin yang terbatas yang bisa dengan mudah hilang karena incompatibilitas dan isu-isu kualitas lainnya. Perlu sama-sama kita ketahui bahwa produk perkebunan dari petani umumnya berkualitas asalan atau FAQ (*fair average quality*) sehingga sulit mendapatkan harga yang sesuai dengan harga pasar dan hampir selalu jadi objek klaim dari pembeli dengan alasan kualitas yang di bawah standar.

Sudah berjalan puluhan tahun sejak pertama kali kemitraan dengan petani kakao dideklarasikan, fokus utamanya adalah hanya kakao fermentasi (*well fermented beans*), namun hal sederhana yang di negara-negara penghasil kakao di Afrika begitu

mudah diwujudkan, ternyata sangat sulit dilakukan di Indonesia. Provokasi tengkulak dan bujukan para kaum populis yang bekerja menjadi kepanjangan tangan importir asing menjadikan program kakao fermentasi yang belakangan ini diupayakan menjadi mandatori, gagal. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada adalah aktor utama dalam pengembangan kakao fermentasi di Indonesia melalui PT. Pagilaran. Namun harus diakui bahwa program kakao fermentasi masih belum dapat memberikan hasil yang memuaskan seperti yang diharapkan. Kembali dibuktikan bahwa keterbukaan terhadap investor di sektor perkebunan kakao yang terlalu ke hulu menjadikan otoritas pengendali kualitas kakao yang ada kehilangan kendali. Sementara itu untuk berkompetisi secara frontal akan menjadi sangat berat karena pemain asing umumnya didukung oleh perbangkan dengan suku bunga yang sangat rendah. Lagi-lagi, kita kalah di rumah sendiri.

Harus ditemukan cara lain yang dapat mengembalikan kehendak kendali kualitas ke tangan anak bangsa, dan salah satu kemungkinannya adalah jika ada entitas bisnis kakao di tanah air yang mampu menjadi offtaker biji kakao petani dalam jumlah besar sekaligus mensyaratkan fermentasi justru agar pendapatan petani kakao meningkat. Hal inilah yang dewasa ini sedang diupayakan oleh PT. Pagilaran, membangun pabrik coklat di tengah kebun kakao inti yang dikelilingi oleh petani plasma kakao. Secara bentukan fisik, ini istimewa, sexy dan dengan mudah dapat dibranding karena berbagai komponen hadir secara

lengkap. Di balik konsep tersebut, sebenarnya terkandung maksud untuk membangun daya tarik generasi muda terhadap kakao melalui produk hilirnya, **coklat!**. Kebutuhan akan coklat yang berkualitas dan memenuhi selera generasi muda diharapkan akan menarik minat mereka menghasilkan bahan baku yang juga berkualitas.

Fakultas Pertanian UGM dan kader pertanian masa depan

Dia masa awal pendiriannya, Fakultas Pertanian UGM sebagaimana fakultas-fakultas lain di bawah bendera Universitas Gadjah Mada mendapatkan tugas untuk mengisi posisi birokrat yang mengalami kekosongan beberapa saat setelah kemerdekaan. Hal ini berjalan dalam kurun waktu yang cukup panjang dan mungkin tidak ada proses yang dilakukan secara sadar untuk menghentikannya. Namun beberapa Fakultas kemudian lebih memilih fokus menjadi lembaga penyedia *training* akademik bagi golongan masyarakat tertentu. Fungsi sebagai penyedia sumberdaya manusia bagi pembangunan bangsa sudah banyak dilupakan. Banyak orang berpendapat bahwa orientasi Universitas untuk menyediakan sumberdaya manusia guna mengisi kebutuhan tenaga kerja dalam pembangunan tidaklah tepat, karena universitas harus lebih berfokus pada penelitian dan tentu saja pendidikan, dan menuntun para lulusan ke dunia kerja yang sesuai dengan bidang keilmuan yang ditekuninya bukan lagi merupakan tugas universitas. Saya tidak bermaksud membahas

apakah pandangan tersebut benar atau salah, namun sudah sejak beberapa tahun terakhir banyak perguruan tinggi di seluruh dunia menyesuaikan diri dengan paradigma *enterpreneurial university*. Sebuah pandangan yang mengedepankan 6 kunci pokok dalam proses pembelajaran yaitu :

- kepemimpinan dan pengelolaan yang baik;
- insentif;
- *enterpreneurship* dalam pengajaran dan pembelajaran;
- budaya *enterpreneurship*;
- kemitraan para pemangku kepentingan;
- internasionalisasi.

Terkait dengan hal ini MacGregor (2015) menyatakan bahwa **‘Teknologi dan inovasi telah memungkinkan evolusi berjalan sedemikian cepat pada saat ini, sementara universitas adalah pengendali inovasi, maka harus disadari bahwa universitas juga harus berevolusi’**. Kemajuan ilmu dan teknologi telah membangun lingkungan baru dimana terjadi perubahan secara cepat dalam tatanan nilai, politik dan tentu saja ekonomi. *Enterpreneurial university* memang konsekuensi dari perkembangan *knowledge based economy* . Kondisi yang demikian akan sangat terakselerasi dalam era digital dan era informasi. Rhenald Khasali (2012), menempatkan era digital pada tataran paling *advance*, sementara era pertanian berada pada tataran paling awal sebelum era industri, era pelayanan, dan era

krisis. Diperlukan lompatan tata nilai yang sangat jauh jika pertanian harus mengikuti perkembangan zaman ke arah mana inovasi dan teknologi telah membentuk tata nilai yang baru.

Untuk melengkapi apa yang sudah dilakukan oleh Fakultas Pertanian bersama PT. Pagilaran dalam membersamai petani meningkatkan kesejahteraannya, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada masih mempunyai tugas berat yaitu menyiapkan komunitas petani untuk dapat menerima transfer pengetahuan dan teknologi melalui penanaman tradisi baru yaitu budaya industrial sehingga menjadi komunitas yang disebut sebagai *acquisitive and knowledge based society*.

Hadirin sekalian yang saya hormati.....

Jika menilik deskripsi persoalan pertanian yang disampaikan Bung Karno yang saya kutip di muka, maka tampak jelas bahwa pekerjaan kita untuk menyelesaikan permasalahan pertanian klasik belumlah bisa dianggap selesai, apalagi ditambah beberapa persoalan baru yang kemudian muncul. Sebagai lembaga pendidikan tinggi yang memiliki rekam jejak yang panjang dalam menghasilkan kader-kader potensial penggerak pembangunan pertanian di Indonesia, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada sudah sepantasnya terpanggil untuk berpartisipasi dalam akselerasi pembangunan pertanian dan penyelesaian permasalahan pertanian di Indonesia.

Dewasa ini ketika kader-kader militan pertanian sudah semakin menipis, maka perlu dipikirkan kepada siapa masa depan pertanian kita akan diestafetkan. Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mencetak kader-kader pertanian yang militan yang punya totalitas dalam berkarya dan bukan kader-kader yang berorientasi jangka pendek dan berwawasan sempit. Kader-kader yang berorientasi pada karya tidak cukup dengan dengan menjadi pribadi-pribadi yang mengejar posisi jabatan dan merasa berhak atas remunerasi karena terlibat dalam sebuah proses tertentu. Fakultas Pertanian UGM harus mampu melahirkan generasi muda berkarakteristik *planters* bukan semata-mata pegawai, karyawan, pekerja pertanian atau perkebunan.

Hadirin yang saya hormati...

Pada kesempatan yang baik ini saya bermaksud mengajukan usulan agar Fakultas Pertanian lebih aktif dalam mengkomunikasikan tentang pembangunan pertanian dengan pemerintah, agar supaya dapat memastikan bahwa pembangunan pertanian harus terus berjalan dengan keberpihakan yang jelas pada para pekerja pertanian di bagian paling hulu dan tidak mengukur kepatutannya semata-mata dari kontribusi sektor pertanian dalam pendapatan negara.

Sebagai upaya untuk terus meningkatkan nilai tambah produk pertanian dan perkebunan maka sebaiknya cakupan pengelolaan pertanian diperluas dari sekedar mengelola komoditas dikembangkan hingga **industri primer berbahan baku hasil pertanian**. Hal ini dimaksudkan untuk lebih memastikan peningkatan pendapatan petani karena ada ruang margin yang cukup leluasa sebagai dampak dari peningkatan nilai tambah. Hal ini juga sekaligus dimaksudkan untuk menguatkan pilar penopang industri perkebunan utamanya jika pilar tradisionalnya sedang terguncang karena turunnya harga komoditas.

Hal lain yang juga penting adalah pemberdayaan Dewan-dewan Komoditas. Keberadaan Dewan-Dewan Komoditas sangat esensial dalam membantu pembangunan pertanian dalam arti luas. Fakultas Pertanian UGM dapat membantu mengajukan usulan untuk memberdayakan dewan-dewan komoditas agar supaya pengembangan komoditas-komoditas tertentu dapat lebih terarah dan dapat dikelola secara tematik

Hadirin yang saya hormati...

Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, semoga menggugah kembali semangat Fakultas Pertanian UGM untuk berperan lebih nyata dalam pembangunan pertanian di Indonesia. banyak kekurangan mohon dimaafkan.

Kepada Civitas Akademika Fakultas Pertanian UGM, saya ucapkan selamat merayakan ulang tahun Fakultas Pertanian UGM yang ke 70. Semoga momentum ini menandai komitmen Fakultas Pertanian UGM untuk kembali mencetak *planters-planters* sejati yang akan mengawal dan memajukan pertanian di Indonesia. Dirgahayu Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada....

Wabillahittaufiq wal hidayyah.....

Wassaalamu'alaikum warahmatullahi wabarokatuh....

Rachmad Gunadi

Daftar Referensi

- De Wolf, C. 2013. Study on best practices in smallholder coffee, cocoa and tea in Indonesia. <http://www.academia.edu/>
- IDH. 2013. IDH Annual report. Issuu. Utrecht.
- Khasali, R.,2012. Cracking values, bersih, bersinar dan kompetitif. PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- KTDA, 2015. KTDA sues watchdog over tea price fixing probe. [http:// www. businessdailyafrica.com/](http://www.businessdailyafrica.com/)
- MacGregor, K. 2015. Six key elements of an entrepreneurial university. <http://www.universityworldnews.com/>
- Pakpahan, A. 2016.Perkebunan Pemerdekaan Indonesia. Media Perkebunan. Jakarta.
- PT.Pagilaran. 2011^b. Peningkatan produksi teh plasma di wilayah unit produksi Kaliboja. Pekalongan/Banjarnegara, Jawa Tengah. Tidak dipublikasikan.
- PT.Pagilaran. 2011^a. Proposal peningkatan produksi teh plasma di wilayah Propinsi Jawa Tengah. Tidak dipublikasikan.
- PT.Pagilaran. 2013. Laporan kinerja manajemen PT. Pagilaran tahun 2012. Tidak dipublikasikan.

